

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)  
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM  
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA  
DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH**

*Oleh*

**Muhammad Khalish<sup>1</sup>,  
Tjahya Supriatna<sup>2</sup>, H. Mansur<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup> Pemerintah Kabupaten Bireuen

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
khalishyusuf@gmail.com

<sup>2,3)</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

---

**ABSTRACT**

*In the era of decentralization, the commitment of district and city governments to the family planning program was improved. This can be seen from the low budget allocation and the lack of infrastructure support for the KKBPK program. This condition makes it difficult to achieve the targets set in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and the Government Work Plan (RKP). To overcome this problem, starting in 2008, the central government allocated transfer funds through KB DAK to meet the physical infrastructure requirements. in the field implementation related to the use of Family Planning Operational Assistance (BOKB) funds in the Family Planning and Family Development (KKBPK) program in the regency of Bireuen Aceh Province, providing several related negotiations. The purpose of this study is 1. Knowing and analyzing the Effectiveness of Using Family Planning Operational Assistance Funds (BOKB) in the Implementation of the Family Planning and Family Development Population Program (KKBPK) in Bireuen Regency, Aceh Province. 2. Knowing and considering the supporting and inhibiting factors of Family Planning Operational Assistance (BOKB) funds in the Implementation of the Family Planning and Family Development Population Program (KKBPK) in Bireuen Regency, Aceh Province. 3. Look for strategies to overcome obstacles to the Family Planning Operational Assistance Fund (BOKB) in the Implementation of the Family Planning and Family Development Population Program (KKBPK) in the Regency of Bireuen Aceh Province.*

*In this study using a type or descriptive qualitative research method used to examine the condition in natural ways. Data collection techniques are carried out by interview, observation and documentation. Informants were determined by purposive sampling technique and except for the community using simple random sampling.*

*The results of this study shows that the effectiveness of the Utilization of Family Planning Operational Assistance Funds (BOKB) in the Implementation of the Family Planning and Family Development Population Program (KKBPK) in Bireuen Regency, Aceh Province has not been effective in terms of population growth rate, % KB acceptors and human development index. Even though the measurement of the level of effectiveness in the form of productivity, efficiency, adap-*

*tation and development was carried out well, in terms of group satisfaction and the objective to channel the BOKB funds optimally they were not satisfied because the Bireuen Regency could not utilize BOKB funds close to 100%..*

**Keywords:** *effectiveness, family, planning*

#### ABSTRAK

Pada era desentralisasi, komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota terhadap program KB mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari rendahnya alokasi APBD dan minimnya dukungan sarana prasarana untuk program KKBPK. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mencapai target yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mulai tahun 2008, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer melalui DAK KB guna memenuhi sarana prasarana fisik tersebut. dalam pelaksanaan di lapangan terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh terdapat beberapa kendala di antaranya Gampong KB masih sedikit dan rendahnya disiplin anggaran. Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. 2. Mengetahui dan menggambarkan faktor pendukung dan penghambat efektivitas Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. 3. Menemukan strategi untuk mengatasi penghambat efektivitas Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan kecuai masyarakat menggunakan simple random sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh belum efektif dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, % akseptor KB dan indeks pembangunan manusia. Meskipun ukuran tingkat efektivitas berupa produktivitas, efisiensi, adaptasi dan pengembangan dilakukan secara baik namun dari segi kepuasan secara kelompok dan tujuan untuk menyalurkan dana BOKB secara optimal belum merasa puas disebabkan belum dapatnya Kabupaten Bireuen memanfaatkan dana BOKB mendekati 100%.

**Kata kunci:** efektivitas, keluarga, berencana

## PENDAHULUAN

Penduduk merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang baik hanya akan bisa diwujudkan oleh penduduk yang berkualitas baik, yang tentu tergantung pada besar jumlah

penduduk. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang cepat serta kualitas rendah tentu mempersulit tercapainya tujuan pembangunan dan menimbulkan masalah peningkatan jumlah penduduk. Permasalahan peningkatan jumlah penduduk

merupakan permasalahan penting yang dialami oleh banyak Negara berkembang, termasuk Indonesia.

Salah satu persoalan yang harus dihadapi sebagai negara berkembang seperti Indonesia adalah masalah kemiskinan yang sulit ditangani. Menurut Martono (2011:163), kemiskinan adalah salah satu dampak sosial pembangunan karena pembangunan dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan antarpenduduk. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal (sandang, pangan dan papan). Karena sifat kemiskinan yang multidimensi tersebut, menurut Martono (2011:163), kemiskinan telah memberi akibat yang juga beragam, yaitu:

- a. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat
- b. Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat
- d. Menurunnya keterlibatan umum dan ketenteraman masyarakat
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- f. Merosotnya mutu generasi yang akan datang

Program Keluarga Berencana (KB) diyakini mampu memutus mata rantai kemiskinan. Pepatah kuno “banyak anak banyak rezeki” tidak layak lagi dipertahankan era ini bahkan jika itu tetap menjadi moto dalam berkeluarga maka akan mewariskan kemiskinan kepada generasi baru sebab dengan populasi penduduk yang besar akan mengurangi peluang dan daya tampung multi sektor. Hakikat program KB selain membentuk opini publik dalam mewujudkan kehidupan yang mandiri dan sejahtera terlebih lagi pada upaya memutuskan garis kemiskinan bagi generasi penerus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Undang-undang ini secara tegas menjelaskan 4 (empat) sub urusan terdiri dari tiga sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu 1) Pengendalian penduduk, 2) KB, 3) Keluarga sejahtera (KS), dan satu sub urusan yang merupakan kewenangan pusat, yaitu standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).

Pada era desentralisasi, komitmen pemerintah daerah Kabupaten dan Kota terhadap program KB mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari rendahnya alokasi APBD dan minimnya dukungan sarana prasarana untuk program KKBPK. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mencapai target yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mulai tahun 2008, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer melalui DAK KB guna memenuhi sarana prasarana fisik tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana prasarana tersebut kurang efektif tanpa didukung oleh anggaran operasional, sehingga mulai tahun 2016 pemerintah pusat mengalokasikan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bagi Kabupaten dan Kota. Hal ini sejalan dengan Pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik. Seluruh upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan agenda prioritas pembangunan (Nawacita), sebagaimana tertuang di dalam RPJMN

2015-2019 dan Renstra BKKBN 2015-2019, khususnya agenda prioritas nomor lima, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”** melalui **“Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)”**. Di dalam RKP 2018, Program KKBPK mendukung prioritas nasional kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah serta pembangunan lintas bidang revolusi mental.

Sasaran yang akan dicapai oleh pembangunan KKBPK pada 2018 antara lain: (1) menurunkan angka kelahiran total/*total fertility rate* (TFR), (2) meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/*contraceptive prevalence rate* (CPR), (3) menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), (4) menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun/*age specific fertility rate* (ASFR), dan menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun. Untuk mencapai sasaran tersebut, BOKB diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal dan bersinergi dengan dana transfer lainnya dan APBD.

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah dana bantuan operasional KB yang bersifat non fisik berupa biaya operasional Balai Penyuluhan KB dan bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan. Pemberian dana bantuan operasional keluarga berencana adalah mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mendukung tercapainya TFR (*Total Fertility Rate*) 2,33 pada akhir tahun 2017, TFR (*Total Fertility Rate*) 2,31 pada akhir tahun 2018 dan TFR (*Total Fertility Rate*) 2,28 pada akhir tahun 2019.

Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) terdiri dari:

1. Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan meliputi: Biaya operasional penyuluhan KB, Biaya operasional pengolahan data, *staff meeting* dan rapat teknis, Alat Tulis Kantor, Biaya langganan daya dan jasa dan Biaya pemeliharaan dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB.
2. Biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota dapat digunakan untuk Biaya Bahan Bakar Minyak dan/atau biaya transport, Biaya jasa pengiriman/ekspedisi, Biaya makan dan minum, Biaya pengepakan dan Biaya bongkar dan/atau muat.
3. Biaya operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB meliputi: Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB, Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB, Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB dan Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan
4. Operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD)
5. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen meliputi Dukungan Media KIE dan Dukungan Manajemen.

Tabel 1 adalah data rencana anggaran beserta realisasi dana BOKB APBK Kabupaten Bireuen 2016 - 2018. Dari tabel 1 diketahui bahwa realiasi dana BOKB APBK Kabupaten Bireuen 2016-2018 tidak mampu diserap seluruhnya bahkan realisasi tersebut cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini berbanding terbalik dengan pagu anggaran yang diberikan setiap tahunnya yang terus mengalami peningkatan.

Tabel 1 Data dana BOKB APBK Kabupaten Bireuen 2016-2018

No	Tahun	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
1	2016	- Bantuan Operasional BALAI penyuluh KB (DAK Non Fisik)	Rp 765.000.000	Rp 395.775.000	Rp 369.225.000
		- Bantuan Dana Operaional KB untuk pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi	Rp 27.300.000	Rp 10.510.700	Rp 16.789.300
2	2017	- Operasional Balai Penyuluh KB (BOKB DAK Non Fisik)	Rp 765.000.000	Rp 414.083.879	Rp 350.916.121
		- Operasional Distribusian Alat Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Rp 73.860.000	Rp 3.097.500	Rp 70.762.500
		- Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik)	Rp 102.000.000	Rp 34.730.000	Rp 67.270.000
3	2018	- Pelaksanaan Rutinitas Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	Rp 1.275.000.000	Rp 373.175.500	Rp 901.824.500
		- Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Rp 85.500.000		Rp 85.500.000
		- Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK Non Fisik)	Rp 1.530.000.000	Rp 798.150.000	Rp 731.850.000
		- Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik)	Rp 3.654.000.000	Rp 1.024.900.000	Rp 2.629.100.000
		- Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik)	Rp 695.940.000	Rp 323.470.000	Rp 372.470.000
No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	
1	2016	Rp 792.300.000	Rp 406.285.700	Rp 386.014.300	
2	2017	Rp 940.860.000	Rp 451.911.379	Rp 488.948.621	
3	2018	Rp 7.240.440.000	Rp 2.519.695.500	Rp 4.720.744.500	

Dalam pelaksanaan program KKBPK saat ini Kabupaten Bireuen telah didukung oleh balai penyuluh sebanyak 17, Gampong KB sebanyak 37, sedangkan jumlah kampung di Kabupaten Bireuen sebanyak 609 dengan 17 kecamatan. Namun berdasarkan koordinasi dengan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB) Kabupaten Bireuen Desember 2018 Bob Mizwar menjelaskan dalam pelaksanaan di lapangan terkait

penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh terdapat kendala di antaranya kondisi geografis Kabupaten Bireuen, infrastruktur yang belum memadai untuk akses ke gampong-gampong yang ada di Kabupaten Bireuen sehingga dari 609 gampong KB hanya 37 yang baru dikukuhkan menjadi gampong KB, dan rendahnya disiplin anggaran.

Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota adalah Dinas Kabupaten dan Kota yang melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten dan Kota. Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dinas yang menaungi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB).

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang diuraikan pada latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) adalah sebagai berikut.

1. Gampong KB masih sedikit;
2. Belum optimalnya laporan pelaksanaan anggaran DAK Subbidang KB Fisik dan Non Fisik di dalam aplikasi Morena;
3. Penyerapan dana BOKB masih rendah;
4. Pelaksanaan kewajiban daerah dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum mampu memberikan manfaat optimal bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bireuen;
5. Tidak adanya disiplin anggaran.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut.

1. Bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam mengatasi penghambat efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh?

### Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
2. Mengetahui dan menggambarkan faktor pendukung dan penghambat efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
3. Menemukan strategi untuk mengatasi penghambat efektivitas pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh

## KAJIAN PUSTAKA

### Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Gibson (2001:120), efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.

Pengertian lain menurut Susanto, efektivitas merupakan daya pesan untuk memengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk memengaruhi (Susanto, 1975:156). Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Sedarmayanti, 1995:61). Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.

Menurut Gibson (1984:32-34) berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi:

1. Kriteria efektivitas jangka pendek: Produksi, Efisiensi, Kepuasan.

2. Kriteria efektivitas jangka menengah: Persaingan, dan Pengembangan

3. Kriteria efektivitas jangka panjang

4. Kelangsungan hidup

Konsep pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Richard M. Steers; 1985: 53) di mana terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan penahapan, baik dalam arti penahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun penahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: beberapa besar ketercapaian program kerja yang dilaksanakan, waktu pelaksanaan dan sasaran yang dicapai.

2. Integrasi

Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri himpunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana program kerja yang dilaksanakan disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki himpunan, kemampuan dana yang tersedia, kemampuan para pengurus sebagai pelaksana, hingga strategi yang sesuai untuk dilaksanakan.

Untuk mengukur efektivitas, menurut Steers sering dipergunakan kriteria yang

terdiri dari: kemampuan penyesuaian diri, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan ber laba, pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Kriteria-kriteria tersebut telah diidentifikasi dengan berbagai alternatif sebagai alat ukur efektivitas

Dari pengertian tersebut dapat diambil simpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Dengan demikian untuk menganalisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut.

$$Efektif = \frac{Realisasi\ Belanja}{Target\ Belanja}$$

Sumber: Mahmudi, 2005:92

Sehubungan dengan pengertian di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Faktor yang memengaruhi efektivitas dalam sebuah kebijakan adalah kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh James L. Gibson, yaitu produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan.

## Produktivitas

Menurut Campbell (Gibson, 1996:50) produksi, meliputi kemampuan menghasilkan jasa seperti yang dituntut

oleh lingkungan; berkaitan dengan hasil atau manfaat program. Produksi, menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan. Dalam konsep ini tidak termasuk pertimbangan tentang efisiensi, yaitu perhitungan nisbah biaya dan keluaran. Ukuran tentang produksi meliputi laba, penjualan, bagian pasar (*market share*), mahasiswa yang lulus, pasien yang sembuh, dokumen yang diproses, pelanggan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan secara langsung dengan output yang dikonsumsi oleh pelanggan organisasi.

Menurut Henry Simamora (2004: 612) faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu:

- a) Kuantitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar ada atau ditetapkan oleh perusahaan.
- b) Kualitas kerja adalah merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam hal ini merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.
- c) Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang disediakan diawal waktu sampai menjadi output.

## Efisiensi

Menurut Campbell (Gibson, 1996:50) efisiensi, meliputi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi menurut Redford

(1975:5) adalah rasio antara input dan output, usaha dan hasil, belanja dan pendapatan, biaya dan keuntungan. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Simon (2004:263), yang menjelaskan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, pembelanjaan dan pemasukan, biaya (ongkos) dan kesenangan yang dihasilkan. Hal ini berarti efisiensi diukur dari rasio antara apa yang diperoleh dengan sumber-sumber yang digunakan. Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian proses menghasilkan output dengan biaya serendah mungkin.

Dimensi Efisiensi Program diuraikan menjadi indikator hasil perencanaan, hasil pelaksanaan, hasil pencapaian, efisiensi pembiayaan, efisiensi waktu, dan efisiensi penggunaan anggaran.

## Kepuasan

Kepuasan (*Satisfaction*) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan amat puas atau senang (Kotler 2006:177). Jadi, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di bawah harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan amat puas atau senang.

Kepuasan kerja menurut Kreitner dan Kinicki (2003:271), adalah suatu respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif

puas dari suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya. Kepuasan kerja jika dikaitkan dengan teori Herzberg dalam Gibson, dkk (1987:107), lebih sering berkaitan dengan prestasi, pengakuan, karakteristik pekerjaan, tanggung jawab, dan kemajuan. Adapun ketidakpastian pekerjaan terutama berkaitan dengan faktor-faktor dalam konteks pekerjaan dan lingkungan, seperti; kebijakan dan administrasi organisasi, pengawasan teknis, gaji, hubungan antar pribadi dengan pengawas, dan kondisi kerja.

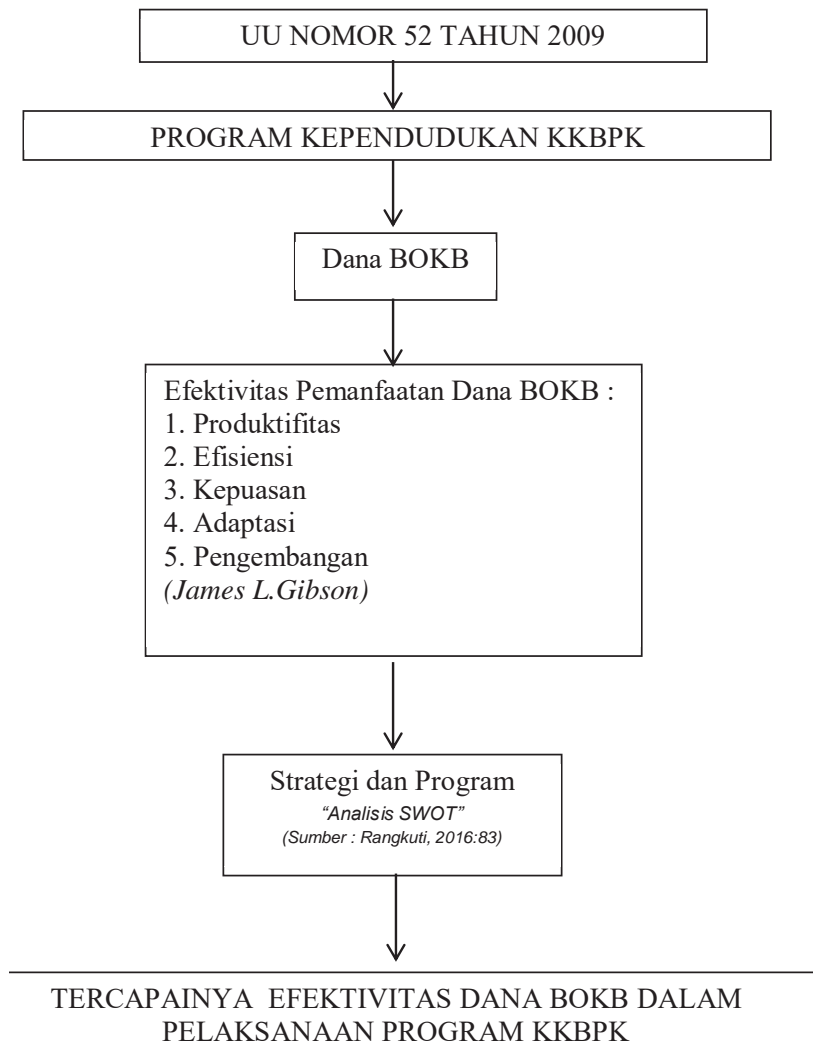
## Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Steers (1985:53), adaptasi dapat dilihat dari bagaimana program kerja yang dilaksanakan disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki himpunan, kemampuan dana yang tersedia, kemampuan para pengurus sebagai pelaksana, hingga strategi yang sesuai untuk dilaksanakan.

## Pengembangan

Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Pengembangan organisasi berhubungan dengan hal penganalisisan masalah-masalah organisasi untuk meningkatkan hasil melalui orang-orang yang berada di dalamnya. Organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya untuk hidup terus (*survive*) dalam jangka- panjang. Usaha pengembangan yang biasa dilakukan adalah program pelatihan bagi tenaga manajemen dan non-manajemen, tetapi sekarang ini perkembangan organisasi telah bertambah banyak macamnya dan meliputi sejumlah pendekatan psikologis dan sosiologis.

## Kerangka Pemikiran



## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif adalah:

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antarkegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak

memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2010:11) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Di sini peneliti mencari fakta tentang bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Dana BOKB Dalam Pelaksanaan Program KKBPK di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dengan inteprestasi yang tepat, serta akan mempelajari masalah yang terjadi di lapangan,

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait efektivitas Dana BOKB Dalam Pelaksanaan Program KKBPK di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:9) sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong (2010:138), yaitu:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden

3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa objek di antaranya di lingkungan pengelola dana BOKB dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong serta Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB) Kabupaten Bireuen yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini, penulis mengambil konsep pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh James L.Gibson di mana terdapat 5 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas, yaitu produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan pengembangan. Pencapaian Tujuan, Integrasi dan adaptasi dengan dengan informan sebagai berikut. 1. Kepala Dinas DPMGPKB ( $I_1$ ), 2. Kepala Bidang Kependudukan dan KB ( $I_2$ ), 3. Kepala Seksi KB ( $I_3$ ), 4. Kepala UPTD ( $I_4$ ), 5. Camat ( $I_5$ ), 6. Masyarakat Gampong KB ( $I_6$ ), dan 7. Tokoh agama ( $I_7$ ).

### Data yang Diperlukan

#### • Data Primer

Menurut Moleong, (2010:157) data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Kependudukan

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dalam rangka mengelola Program Kependudukan Keluarga Berencana.

Dalam penelitian ini subjek penelitian dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dengan berusaha memasukkan ciri-ciri tertentu terhadap responden menurut kehendak peneliti. Tujuan penggunaan teknik ini untuk memperoleh informasi yang jelas tentang bagaimana Efektivitas pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

- **Data Sekunder**

Menurut Moleong, (2010:159), data sekunder adalah

data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survei, studi histories, dan sebagainya.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah sekunder dikumpulkan melalui wawancara langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala

BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya dan Peraturan kepala Badan BKKBN Nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis dana BOKB dan data lainnya berupa arsip dinas DPMGPKB, Balai penyuluhan, Pokja gampong KB, Gampong KB, kantor kecamatan dan hal-hal yang dianggap ada kaitannya dengan objek penelitian

### **Informan dan Cara Menentukannya**

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini, yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*.

Teknik *purposive*, yaitu menentukan informan yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Menurut Sugiyono (2010:300), teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling*, yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata

dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu di bidangnya. Sehingga dari purposive sampling tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri. Sedangkan *Snowball sampling* menurut Sugiyono (2008:300) adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya, yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah seperti dalam tabel berikut.

**Tabel 1** Responden Penelitian

No	Informan	Teknik Sampling
1	Kepala dinas DPMGPKB (1 orang)	Purposive sampling
2	Kepala Bidang Kependudukan dan KB (1 orang)	Purposive sampling
3	Kepala Seksi KB (1 orang)	Purposive sampling
4	Kepala UPTD (17 orang)	Purposive sampling
5	Camat (17 orang)	Purposive sampling
6	Masyarakat Gampong KB	Snowball sampling
7	Tokoh agama	Snowball sampling

Dengan mewawancarai pimpinan dari lembaga dan masyarakat di Kabupaten Bireuen tersebut, peneliti mendapatkan informasi dengan tingkat keabsahan data yang tinggi.

## Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memahami lebih lanjut ketiga teknik pengumpulan data tersebut akan dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

### 2. Observasi

Observasi menurut Bungin metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

### 3. Dokumentasi

Melaksanakan metode dokumentasi, Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi dengan pemahaman yang disampaikan oleh Denzim dan Patton dalam Sulistiany yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi pengamat/investigator.

## HASIL PENELITIAN

### Efektivitas Dana BOKB

Berdasarkan data yang sangat sedikit, yaitu 3 tahun saja, pemanfaatan dana BOKB di Kabupaten Bireuen terbukti secara empiris mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, atau dengan perkataan lain pemanfaatan dana BOKB terbukti efektif menurunkan angka kemiskinan. Dengan berlalunya waktu jika data sudah banyak, dapat diharapkan bahwa pemanfaatan dana BOKB di Kabupaten Bireuen akan memberi pengaruh yang signifikan juga terhadap % akseptor KB umur 15-49 tahun, laju pertumbuhan penduduk, dan peningkatan IPM. Dengan data yang lebih banyak, dapat dibuktikan efektivitas dana BOKB akan lebih luas pengaruhnya bagi indikator kesejahteraan keluarga.

Efektivitas dana BOKB ini juga dapat diharapkan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Gampong KB yang terbentuk. Seperti diketahui jumlah Gampong KB di Kabupaten Bireuen saat ini baru mencapai 37 dari jumlah 609 Gampong yang ada, sehingga potensi tumbuhnya Gampong KB masih besar. Dengan semakin meningkatnya jumlah Gampong KB, dapat diharapkan permintaan dana BOKB akan meningkat pula. Harapan peningkatan efektivitas dana BOKB tersebut dapat dicapai jika jumlah Gampong KB meningkat sehingga realisasi efektivitas dana BOKB akan meningkat untuk membiaya operasional Balai Penyuluhan KB, penambahan Gampong KB yang terbentuk.

Dengan meningkatnya jumlah Gampong KB maka dana BOKB yang dibutuhkan untuk membiayai operasional akan meningkat, biaya pendistribusian alokan akan meningkat, biaya perjalanan penyuluh KB akan meningkat. Atau Utamanya jika Gampong KB berlokasi di tempat yang terpencil yang sulit dicapai.

Pemanfaatan dana BOKB adalah sebuah program, sehingga pengukuran efektivitasnya seyogianya berpatokan pada efektivitas program. Pendekatan teori efektivitas Gibson adalah teori efektivitas organisasi dengan pendekatan organisasi sebagai sebuah sistem mulai dari masukan, proses hingga keluaran; mulai dari efektivitas pekerja, efektivitas kelompok kerja dan efektivitas organisasi, dengan dimensi meliputi produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan. Jika teori efektivitas Gibson akan diterapkan, sesuai dengan judul penelitian, maka teori ini diterapkan pada program dana BOKB sebagai penunjang program KKBPK, bukan pada program KKBPK-nya. Sehingga pembahasan teori efektivitas Gibson cocok untuk menilai efektivitas SDM terkait dana BOKB, meliputi SDM balai Penyuluhan, SDM Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, SDM Kader Pembina KB, SDM Gampong KB, dan SDM KIE. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I<sub>1</sub>-I<sub>7</sub>, diperoleh masukan sebagai berikut.

#### ► Produktivitas

Penilaian efektivitas produktivitas SDM terkait pemanfaatan dana BOKB dilakukan oleh atasan langsung dalam hal ini Dinas DPMGPKB dan Kecamatan, dari aspek kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dana BOKB menggunakan tolok ukur KPI yang berlaku.

- a. Kuantitas  
Secara kuantitas, beban kerja masing-masing SDM sudah sesuai dengan KPI yang berlaku.
- b. Kualitas  
Secara kualitas, beban kerja masing-masing SDM sudah sesuai dengan KPI yang berlaku.
- c. Ketepatan waktu  
Demikian pula ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dari peran

masing-masing SDM sudah sesuai dengan KPI yang berlaku.

### ► Efisiensi

#### a. Penggunaan waktu

Masing-masing SDM sesuai dengan perannya masing-masing dinilai telah menggunakan waktu dengan efisien.

#### b. Penggunaan tenaga

Jumlah dan kualifikasi SDM sesuai perannya masing-masing dinilai sudah cukup.

#### c. Penggunaan biaya

Masing-masing SDM sesuai dengan perannya masing-masing dinilai sudah melakukan upaya efisiensi penggunaan biaya secara bertanggung jawab dan memenuhi criteria keterbukaan akuntabilitas.

### ► Kepuasan

#### a. Prestasi

Secara individual, SDM sesuai perannya masing-masing merasa puas dengan prestasi kinerja mereka, tetapi secara kelompok dan tujuan untuk menyalurkan dana BOKB secara optimal belum merasa puas. Hal ini disebabkan belum dapatnya Kabupaten Bireuen memanfaatkan pagu dana BOKB secara penuh (mendekati 100%). Tidak tercapainya pemanfaatan pagu dana BOKB yang disediakan ditengarai bukan karena ketidakmampuan SDM melakukan perencanaan, tetapi lebih pada adanya kendala fisik geografi lokasi.

#### b. Pengakuan

Semua SDM dari masing-masing peran dalam pemanfaatan dana BOKB mendapat pengakuan yang tinggi atas pekerjaannya. Karena pekerjaannya memberikan kontribusi yang besar terhadap kesehatan masyarakat,

kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan akhir Pemerintah.

#### c. Karakteristik pekerjaan

sebagaimana layaknya penyaluran dana bantuan lainnya, penyaluran dana BOKB bercirikan perencanaan, penyaluran dan monitoring serta evaluasi. Perencanaan yang baik akan berdampak pada penetapan pagu anggaran dana yang akurat, sehingga akan meminimalkan terjadinya sisa anggaran. Dalam penyalurannya, ketepatan penggunaan akan meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban. Proses monitoring dan evaluasi akan dapat terlaksana dengan baik jika perencanaan dibuat terperinci dan jelas tujuan, sasaran, serta penanggung jawabnya.

Pekerjaan terkait penyaluran dana BOKB merupakan pekerjaan yang menantang akan tetapi sangat rentan salah guna atau disalahgunakan.

#### d. Kemajuan

Jika dilihat pada kecenderungan peningkatan penyerapan dana BOKB sejak tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa SDM yang dipersiapkan di masing-masing peran telah mengalami kemajuan baik dari aspek keterampilan maupun dari aspek *governance*.

### ► Adaptasi

#### a. Kesesuaian dengan sarana

Sumber daya manusia setiap mata rantai pemanfaatan dana BOKB di Kabupaten Bireuen telah dilengkapi dengan sarana yang memadai dan sesuai dengan keadaan lapangan.

#### b. Kesesuaian dengan prasarana

c. Sumber daya manusia setiap mata rantai pemanfaatan dana BOKB di Kabupaten Bireuen juga telah dilengkapi dengan prasarana yang memadai dan sesuai dengan keadaan lapangan.

- d. Kesesuaian dengan kemampuan dana  
Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masing-masing SDM disediakan sesuai dengan dana yang tersedia.
- e. Kesesuaian dengan pengurus sebagai pelaksana  
Pemanfaatan dana BOKB juga telah disesuaikan dengan pengurus dan pelaksana di lapangan.
- f. Kesesuaian strategi  
Sumber daya manusia terkait pemanfaatan dana BOKB juga dibekali dengan strategi yang baku dalam melaksanakan pemanfaatan dana BOKB dimaksud. Strategi yang baru tersebut disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak terkait dan disesuaikan dengan lingkungan kerja masing-masing.

#### ► Pengembangan

- a. Diagnosis kebutuhan untuk memperbaiki efektivitas organisasi  
Uraian butir 1 hingga butir 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa secara organisasi, para pengurus, pelaksana dan SDM lainnya yang terkait langsung dengan perencanaan, penyaluran dan pemanfaatan dana BOKB di Kabupaten Bireuen sudah solid dan siap bekerja dengan baik. Kondisi SDM dan struktur organisasi yang baik ini merupakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam merumuskan strategi pencapaian sasaran pemanfaatan dana BOKB dengan baik dan benar.
- b. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan  
Efektivitas pemanfaatan dana BOKB yang telah terjadi selama ini merupakan pengalaman dan masukan yang baik untuk memperbaiki strategi selanjutnya. Data efektivitas dana BOKB dilengkapi dengan kekuatan faktor internal seperti payung hukum dan keorganisasian

BKKBN, kesiapan dana anggaran khusus, serta berbagai program yang dipersiapkan termasuk program KKBPK, Gampong KB, balai penyuluhan, dinas dan Kecamatan merupakan kesatuan dari kekuatan internal yang dimiliki dan siap membantu kelancaran program dana BOKB. Dengan memperhatikan faktor kelemahan seperti kecenderungan keluarga yang enggan menggunakan alat KB, tingkat ketersediaan sarana komunikasi masyarakat yang belum maksimal. Serta memperhatikan peluang yang dimiliki seperti masih sedikitnya Kecamatan di Kabupaten Bireuen yang mempunyai Gampong KB, jumlah penduduk dengan gender perempuan yang lebih besar dari gender laki-laki. Di samping itu ada juga ancaman dari kondisi geografis yang kurang menguntungkan, menurunnya jumlah akseptor KB, rendahnya angka melek huruf dan rendahnya jumlah pengguna internet. Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut dapat disusun strategi baru guna meningkatkan penggunaan dana BOKB untuk melengkapi program KKBPK di Kabupaten Bireuen.

- c. Mengembangkan aktivitas untuk melaksanakan strategi  
Setelah strategi tersusun dan disetujui semua pihak yang terkait, dapat direncanakan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan strategi dimaksud, seperti kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan SDM dan lainnya.
- d. Memastikan arus balik monitoring dan evaluasi  
Agar kegiatan pelaksanaan yang dilakukan tersebut dapat tetap di arah yang benar, yaitu mencapai sasaran peningkatan pemanfaatan dana BOKB yang efektif, maka perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Dana BOKB

Uraian faktor pendukung efektivitas dana BOKB mengungkapkan bahwa sejatinya faktor pendukung utama efektivitas dana BOKB adalah keberadaan program KB sudah berlangsung lama yang menyiratkan dukungan pemerintah, serta telah terbentuknya balai penyuluhan di setiap Kecamatan. Hal ini berarti secara struktur dan teknologi, karakteristik organisasi dan SDM terkait perencanaan, penyaluran, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi program dana BOKB telah lengkap dan kuat. sebagaimana telah dibahas sebelumnya, keterikatan SDM pada organisasi cukup kuat, baik dari aspek prestasi, pengakuan, adaptasi terhadap sarana dan prasarana. Dari aspek kebijakan dalam praktik manajemen seperti penyusunan tujuan strategis, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta inovasi SDM yang ada sudah cukup berpengalaman bukan hanya dalam menangani program dana BOKB tetapi juga menjalankan program dan kegiatan lainnya terkait program KKBPK yang sudah berlangsung lebih lama. Sehingga aspek kebijakan dalam praktik manajemen merupakan kekuatan tersendiri.

Uraian faktor penghambat efektivitas dana BOKB mengungkapkan bahwa penghambat utama adalah masih sedikitnya Gampong KB yang terbentuk serta sulitnya kondisi geografis Kabupaten Bireuen. Sedikitnya Gampong KB berarti pemanfaatan dana BOKB untuk operasional Gampong KB dan pendistribusian alokon juga sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menciptakan Gampong-Gampong KB baru diperlukan SDM pendukung baru yang perlu direkrut, dididik, dan dilatih. Dari sisi SDM yang diperlukan adalah jumlahnya yang masih kurang. Karakteristik ekstern yang juga menjadi penghambat adalah kondisi geografis yang tidak merata dan tidak menguntungkan, sehingga banyak Gampong dan desa yang

terletak jauh dan sulit di jangkau sehingga perkembangan Gampong KB juga terhambat. Karakteristik penghambat lainnya adalah angka melek huruf yang rendah, kepemilikan alat komunikasi masyarakat yang rendah, kecenderungan menurunnya ibu-ibu akseptor KB, dan kecenderungan ibu-ibu pasangan yang baru menikah untuk tidak menggunakan kontrasepsi.

Akan tetapi penghambat utama efektivitas dana BOKB tersebut juga merupakan potensi peningkatan dana BOKB, apabila SKPD KB dan Balai Penyuluhan KB dapat menciptakan Gampong-Gampong baru di 572 Gampong yang belum menjadi Gampong KB. Peningkatan jumlah Gampong KB akan meningkatkan kebutuhan biaya operasional Gampong KB serta meningkatnya operasional pendistribusian alokon. Di samping itu dana BOKB juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan SKPD KB dan Balai Penyuluhan KB yang dapat bekerja sama dengan SKPD lain membuat program-program untuk meningkatkan akseptor KB, meningkatkan angka melek huruf, dan meningkatkan minat penduduk memanfaatkan internet sebagai sumber informasi dan edukasi.

## Strategi Penyaluran Dana BOKB

Strategi penyaluran dana BOKB akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT. Untuk itu perlu disusun butir-butir kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) berdasarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan realisasi dana BOKB di Kabupaten Bireuen.

### ► *Strenghts*

- a. Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah berjalan di Indonesia sejak lama sejak dimulai pada 70-an. Masyarakat dunia menganggap program Keluarga Berencana (KB) telah berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna.

- b. Payung hukum dan komitmen dukungan Pemerintah terhadap program dana BOKB sudah kuat.
- c. Kabupaten Bireuen mempunyai 17 Kecamatan dan di masing-masing Kecamatan telah ada Balai penyuluhan KB, yang dapat membantu SKPD KB menyusun perencanaan anggaran, menyalurkan dan memantau pemanfaatan dana BOKB, serta membuat laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana tersebut.
- d. Sumber daya manusia yang ada pada mata rantai organisasi terkait penyaluran dana BOKB yang ada sudah kuat dari segi kualifikasi, keterikatan dengan organisasi dan kepuasannya.
- e. Angka melek huruf laki-laki dan perempuan kurun waktu 2013-2017 mempunyai kecenderungan meningkat. Angka melek huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.
- f. Angka IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Data kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan angka IPM Kabupaten Bireuen mengalami kestabilan di peringkat 9.
- g. Angka kemiskinan Kabupaten Bireuen selama kurun waktu tahun 2014-2017 mengalami penurunan. Pada 2014 persentase penduduk miskin sebesar 16,94 persen, dan pada 2017 persentase penduduk miskin sebesar 15,87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bireuen semakin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- h. Penduduk Kabupaten Bireuen sudah mengenal telepon seluler, komputer/laptop yang digunakan untuk sarana KIE.

### ► **Weaknesses**

- a. Jumlah Gampong KB sebanyak 37 dari 609 Gampong yang ada masih terlalu sedikit (6.08%) sehingga penyaluran dana BOKB juga masih kecil.
- b. Kondisi geografis yang sangat berbeda antara wilayah barat yang berlereng dengan wilayah timur yang lebih baik menyebabkan tidak tersebarnya sarana dan prasarana secara merata, sehingga akses ke Gampong sulit dan penyebaran dan kepadatan penduduk sangat bervariasi; yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan rakyat yang juga bervariasi.
- c. Angka IPM Kabupaten Bireuen berada pada rentang 60 s.d 70 yang berarti Bireuen termasuk dalam daerah yang memiliki status pembangunan manusia sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bireuen masih perlu ditingkatkan.
- d. Kepemilikan/penguasaan telepon seluler di Kabupaten Bireuen masih cukup rendah. Pada 2017, terdapat sekitar 55,87 persen penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler. Sementara itu persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah dan memiliki komputer/laptop masing-masing sebesar 1,44 persen dan 19,78 persen.

### ► **Opportunities**

- a. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki dengan sex ratio sebesar 95,84; dengan demikian potensi akseptor KB besar.
- b. Jumlah Gampong KB sebanyak 37 dari 609 Gampong yang ada masih terlalu sedikit (6.08%), sehingga peluang untuk berkembang masih besar, masih ada 572 Gampong yang belum tergarap; berarti peluang penyaluran dana BOKB pun besar.

### ► **Threats**

- a. Persentase perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin yang pernah menjadi akseptor KB cenderung menurun, sedangkan yang tidak menggunakan akseptor KB cenderung meningkat.
- b. Dari tahun ke tahun angka melek huruf perempuan lebih rendah dari angka melek huruf laki-laki; malahan setelah tahun 2014, angka melek huruf perempuan cenderung menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan kemampuan menerima pengetahuan baru seperti KB juga menurun.
- c. Penduduk Kabupaten Bireuen yang melakukan akses internet selama 3 bulan terakhir pada 2017 sebanyak 21,42 persen. Ternyata masih banyak penduduk Bireuen yang kurang terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan rincian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut di atas, dapat disusun matriks strategi efektivitas pemanfaatan dana BOKB sebagai berikut.

1. Strategi SO; yaitu strategi menggunakan kekuatan yang ada untuk menggarap peluang yang ada.
  - a. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki dengan sex ratio sebesar 95,84; dengan demikian potensi akseptor KB besar.

Untuk menggarap peluang ini, strategi yang diperlukan adalah:

SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program sosialisasi manfaat KB bagi kesejahteraan keluarga pada umumnya dan khususnya bagi kesehatan perempuan. Sasarannya adalah

ibu-ibu rumah tangga yang berada di Gampong-Gampong yang belum menjadi Gampong KB.

- b. Jumlah Gampong KB sebanyak 37 dari 609 Gampong yang ada masih terlalu sedikit (6.08%), sehingga peluang untuk berkembang masih besar, masih ada 572 Gampong yang belum tergarap; berarti peluang penyaluran dana BOKB pun besar.

SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dan beberapa Gampong KB yang telah ada dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program sosialisasi manfaat didirikannya Gampong KB. Sasarannya adalah Gampong-Gampong yang belum menjadi Gampong KB agar tertarik untuk mendirikan Gampong KB.

SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dan beberapa Gampong KB yang telah ada perlu melakukan rekrutmen, pendidikan dan pelatihan SDM baru yang dipersiapkan untuk mengelola Gampong-Gampong KB baru.

2. Strategi ST; yaitu strategi menggunakan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman yang ada.

- a. Persentase perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin yang pernah menjadi akseptor KB cenderung menurun, sedangkan yang tidak menggunakan akseptor KB cenderung meningkat.

SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dan dokter Kabupaten dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program sosialisasi manfaat menjadi akseptor KB yang dapat

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kesehatan perempuan. Sasarannya adalah perempuan yang pernah kawin yang pernah menjadi akseptor KB dan ibu rumah tangga yang belum menjadi akseptor KB.

- b. Dari tahun ke tahun angka melek huruf perempuan lebih rendah dari angka melek huruf laki-laki; malahan setelah tahun 2014, angka melek huruf perempuan cenderung menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan kemampuan menerima pengetahuan baru seperti KB juga menurun.

SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dan bantuan teknis dari SKPD Pendidikan dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program pembelajaran membaca utamanya bagi ibu rumah tangga yang masih buta aksara.

- c. Penduduk Kabupaten Bireuen yang melakukan akses internet selama 3 bulan terakhir pada 2017 sebanyak 21,42 persen. Ternyata masih banyak penduduk Bireuen yang kurang terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dan bantuan teknis dari SKPD KIE atau ahli TIK dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program pembelajaran pengenalan, penguasaan dan manfaat dari internet bagi keluarga. Sasarannya adalah keluarga yang belum dapat memanfaatkan internet.

3. Strategi WO, yaitu strategi menggunakan kelemahan yang ada untuk menggarap peluang yang ada.

- a. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki dengan sex ratio sebesar 95,84; dengan demikian potensi akseptor KB besar.

SKPD KB bekerja sama dengan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan yang lokasinya sulit dijangkau dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program sosialisasi KB bagi Gampong dan penduduk yang terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

- b. Jumlah Gampong KB sebanyak 37 dari 609 Gampong yang ada masih terlalu sedikit (6.08%), sehingga peluang untuk berkembang masih besar, masih ada 572 Gampong yang belum tergarap; berarti peluang penyaluran dana BOKB pun besar.

SKPD KB bekerja sama dengan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan yang lokasinya sulit dijangkau dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program sosialisasi dan pembentukan Gampong KB bagi Gampong-Gampong yang berada di lokasi terpencil.

4. Strategi WT; yaitu strategi menggunakan kelemahan yang ada untuk menghadapi ancaman yang ada.

- a. Persentase perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin yang pernah menjadi akseptor KB cenderung menurun, sedangkan yang tidak menggunakan akseptor KB cenderung meningkat.

SKPD KB bekerja sama dengan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan yang lokasinya sulit dijangkau dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program sosialisasi pentingnya menjadi

akseptor KB bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kesehatan ibu rumah tangga yang bermukim di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

- b. Dari tahun ke tahun angka melek huruf perempuan lebih rendah dari angka melek huruf laki-laki; malahan setelah tahun 2014, angka melek huruf perempuan cenderung menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan kemampuan menerima pengetahuan baru seperti KB juga menurun.

SKPD KB bekerja sama dengan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan yang lokasinya sulit dijangkau dan bantuan teknis SKPD Pendidikan dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program pembelajaran membaca bagi ibu rumah tangga yang berada di lokasi terpencil yang sulit dijangkau.

- c. Penduduk Kabupaten Bireuen yang melakukan akses internet selama 3 bulan terakhir pada 2017 sebanyak 21,42 persen. Ternyata masih banyak penduduk Bireuen yang kurang terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

SKPD KB bekerja sama dengan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan yang lokasinya sulit dijangkau dan bantuan teknis SKPD TIK dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program pengenalan, penguasaan dan pemanfaatan jaringan internet, utamanya bagi ibu rumah tangga yang berada di lokasi terpencil yang sulit dijangkau.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat penulis menarik simpulan sebagai berikut.

1. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dalam pelaksanaan program Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh belum efektif dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, % akseptor KB dan indeks pembangunan manusia. Meskipun ukuran tingkat efektivitas berupa produktivitas, efisiensi, adaptasi dan pengembangan dilakukan secara baik namun dari segi kepuasan secara kelompok dan tujuan untuk menyalurkan dana BOKB secara optimal belum merasa puas disebabkan belum dapatnya Kabupaten Bireuen memanfaatkan dana BOKB mendekati 100%.
2. Terdapat beberapa faktor pendukung efektivitas Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh; antara lain:
  - a. Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah berjalan di Indonesia sejak lama sejak dimulai pada 70-an. Masyarakat dunia menganggap program Keluarga Berencana (KB) telah berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna.
  - b. Kabupaten Bireuen mempunyai 17 Kecamatan dan di masing-masing Kecamatan telah ada Balai penyuluhan KB, yang dapat membantu SKPD KB menyusun perencanaan anggaran, menyalurkan dan memantau pemanfaatan dana BOKB, serta

- membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
- c. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki dengan sex ratio sebesar 95,84; dengan demikian potensi akseptor KB besar.
  - d. Angka melek huruf laki-laki dan perempuan kurun waktu 2013-2017 mempunyai kecenderungan meningkat. Angka melek huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.
  - e. Angka IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Data kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan angka IPM Kabupaten Bireuen mengalami kestabilan di peringkat 9.
  - f. Angka kemiskinan Kabupaten Bireuen selama kurun waktu tahun 2014-2017 mengalami penurunan. Pada 2014 persentase penduduk miskin sebesar 16,94 persen, dan pada 2017 persentase penduduk miskin sebesar 15,87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bireuen semakin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - g. Penduduk Kabupaten Bireuen sudah mengenal telepon seluler, komputer/laptop yang digunakan untuk sarana KIE.
3. Faktor penghambat efektivitas dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dalam pelaksanaan program Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh; antara lain:
- a. Jumlah Gampong KB sebanyak 37 dari 609 Gampong yang ada masih terlalu sedikit (6,08%) sehingga penyaluran dana BOKB juga masih kecil.
  - b. Kondisi geografis yang sangat berbeda antara wilayah barat yang berlereng dengan wilayah timur yang lebih baik menyebabkan tidak tersebarnya sarana dan prasarana secara merata, sehingga akses ke Gampong sulit dan penyebaran dan kepadatan penduduk sangat bervariasi; yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan rakyat yang juga bervariasi.
  - c. Persentase perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin yang pernah menjadi akseptor KB cenderung menurun, sedangkan yang tidak menggunakan akseptor KB cenderung meningkat.
  - d. Dari tahun ke tahun angka melek huruf perempuan lebih rendah dari angka melek huruf laki-laki; malahan setelah tahun 2014, angka melek huruf perempuan cenderung menurun.
  - e. Angka IPM Kabupaten Bireuen berada pada rentang 60 s.d 70 yang berarti Bireuen termasuk dalam daerah yang memiliki status pembangunan manusia sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bireuen masih perlu ditingkatkan.
  - f. Kepemilikan/penguasaan telepon seluler di Kabupaten Bireuen masih cukup rendah. Pada 2017, terdapat sekitar 55,87 persen penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler. Sementara itu persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah dan memiliki komputer/laptop masing-masing sebesar 1,44 persen dan 19,78 persen.

- g. Penduduk Kabupaten Bireuen yang melakukan akses internet selama 3 bulan terakhir pada 2017 sebanyak 21,42 persen. Ternyata masih banyak penduduk Bireuen yang kurang terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Strategi yang dilakukan dalam mengatasi penghambat efektivitas Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dalam pelaksanaan program Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, antara lain:
- a. SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program sosialisasi manfaat KB bagi kesejahteraan keluarga pada umumnya dan khususnya bagi kesehatan perempuan. Sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga yang berada di Gampong-Gampong yang belum menjadi Gampong KB.
  - b. SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dan beberapa Gampong KB yang telah ada dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program sosialisasi manfaat didirikannya Gampong KB. Sasarannya adalah Gampong-Gampong yang belum menjadi Gampong KB agar tertarik untuk mendirikan Gampong KB..
  - c. SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dan dokter Kabupaten dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program sosialisasi manfaat menjadi akseptor KB yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kesehatan perempuan. Sasarannya adalah perempuan yang pernah kawin yang pernah menjadi akseptor KB dan ibu rumah tangga yang belum menjadi akseptor KB.
  - d. SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dan bantuan teknis dari SKPD Pendidikan dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program pembelajaran membaca utamanya bagi ibu rumah tangga yang masih buta aksara
  - e. SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dan bantuan teknis dari SKPD KIE atau ahli TIK dapat melakukan perencanaan anggaran BOKB untuk membuat program pembelajaran pengenalan, penguasaan dan manfaat dari internet bagi keluarga. Sasarannya adalah keluarga yang belum dapat memanfaatkan internet.
  - f. SKPD KB bekerja sama dengan 17 Balai Penyuluhan KB di tiap Kecamatan dan beberapa Gampong KB yang telah ada perlu melakukan rekrutmen, pendidikan dan pelatihan SDM baru yang dipersiapkan untuk mengelola Gampong-Gampong KB baru yang akan terbentuk.

## SARAN

Pemanfaatan dana BOKB dalam pelaksanaan program KKBPK di Kabupaten Bireuen belum efektif, dengan demikian disarankan:

### 1. Terkait Efektivitas Dana BOKB

Peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi dalam

perencanaan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan DAK Sub Bidang KB Kabupaten Bireuen sehingga tujuan yang sesuai petunjuk teknis dapat terlaksana dengan tepat.

## 2. Terkait Faktor Pendukung dan Penghambat BOKB

SKPD KB dan Balai Penyuluh KB perlu mewaspadai penghambat efektivitas penyaluran dana BOKB yang mempunyai potensi menjadi ancaman seperti

- a. Persentase perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin yang pernah menjadi akseptor KB cenderung menurun, sedangkan yang tidak menggunakan akseptor KB cenderung meningkat.
- b. Dari tahun ke tahun angka melek huruf perempuan lebih rendah dari angka melek huruf laki-laki; malahan setelah tahun 2014, angka melek huruf perempuan cenderung menurun.
- c. Penduduk Kabupaten Bireuen yang melakukan akses internet selama 3 bulan terakhir pada 2017 sebanyak 21,42 persen. Ternyata masih banyak penduduk Bireuen yang kurang terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Ancaman tersebut perlu diwaspadai karena menanganinya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan memerlukan kerja sama yang baik dengan pihak ketiga seperti SKPD Pendidikan dan SKPD TIK.

## 3. Terkait Strategi BOKB

Penerapan strategi menghadapi hambatan efektivitas dana BOKB di Kabupaten Bireuen tersebut dalam simpulan, berkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah Kabupaten mempercepat pembangunan ekonomi wilayahnya yang sebagian mempunyai

geografi yang sulit terjangkau sehingga pemerataan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berpotensi terhambat.

Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bireuen membuat program-program terobosan yang dapat mempercepat pemerataan infrastruktur pembangunan seperti sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana perekonomian dan sarana pemerintahan. Pemerataan infrastruktur pembangunan tersebut akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi jalannya program KB, kesejahteraan keluarga, dan kesehatan ibu dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi. Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana*.
- Bridgman, Peter dan Glyn Davis. 2004, *The Australian Policy Handbook*, Crows Nest.
- Budi Winarno. 2008, *Kebijakan Publik*, PT. Buku Kita, Jakarta.
- Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Donnelly, Gibson, 1984, *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses. Edisi Keempat*. Penerbit. Erlangga, Jakarta.
- , 1996, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Erlangga, Jakarta.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada. University Press, Yogyakarta.

- Edi Suharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendy, Onong Uchjana. 1989, *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, 2001, *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*, Erlangga, Jakarta.
- Handayani, Sri, 2010, *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, Pustaka Rihama, Yogyakarta.
- Handayaningrat, 2006, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 1995, *Manajemen*, BPFE: Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2007, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Henry Simamora, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga*, STIE YPKN, Yogyakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2002, *Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup*. YPAPI, Yogyakarta.
- Hidayat, 1986, *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn., 1990. *Policy Analysis For The Real Word*, Oxford University Press, USA.
- Inu Kencana Syafiie, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Makmur, 2010, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Jakarta.
- , *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung.
- Malayu, S.P. Hasibuan, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan 9*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mantra, 2008, *Demografi Umum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Manullang, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Martono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Raya Grafindo Persada, Jakarta.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsan, Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir dan Budiarto, 1986, *Teori-teori Kependudukan*, PT Bina. Aksara, Jakarta.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Oktaviani, Anisa Sevi, 2016, *Efektivitas Kebijakan Kampung Keluarga Berencana terhadap Penerimaan Konsep Keluarga Berencana (Studi Kasus Faktor Instiusional dan Faktor Sosial di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Pasolong, Harbani. 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Richard M. Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2006, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung.
- Siagian, Sondang., P, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama)*, Binapura Aksara, Jakarta.
- Simon, Hasanu. 2004. *Membangun Kembali Hutan Indonesia. Cetakan I*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Steers, M. Richard. 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.

Sudarti, Ken, Prasetyaningtyas, Puji, 2011, *Peningkatan Minat Dan Keputusan Berpartisipasi Akseptor KB*. journal.unnes.ac.id.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

-----, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Suharno, 2008, *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Rineka Cipta, Jakarta.

Sunyoto, 2012, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran. Cetakan Pertama*. Caps, Yogyakarta.

Susanto, 1975, *Efektivitas*, Bina Cipta, Bandung.

Tangkilisan, Hesel Nogi, 2005, *Strategi Keunggulan Pelayanan Publik: Manajemen Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik (Konsep-Teori & Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Konsep Russel)*, Kerja sama Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset, Yogyakarta.

-----, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Lukman Offset YPAPI

Tjiptono dan Sunyoto, 2012, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Cetakan Pertama*, Caps, Yogyakarta.

Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, 2012, *Pemasaran Strategik*, Andi, Yogyakarta.

Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Zuhriah, Aminatuz, 2013, *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun*, Universitas Airlangga, Surabaya.

#### Tesis

Cahyadi, Darkan, 2017. *penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Desa Ngaran Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo (Studi terhadap Peran Tokoh Agama)*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Purba, Dora Sonia, 2014, *Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Pasca Persalinan di Kota Bandarlampung (Studi pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandarlampung

#### Jurnal

Abubakar AN, Siregar. 2010. *Kualitas Pelayanan Penyuluhan dan Kepuasan Petani dalam Penanganan dan Pengolahan Hasil Ubi Jalar (Ipomoea batatas L.)*. Jurnal Penyuluhan Pertanian 5(1).

Budiani, Ni Wayan, 2007, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti"*. Denpasar: Jurnal Ekonomi dan Sosial Input. Volume 2 No.1

Merrynce dan Hidir Ahmad, 2013, *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana*. Jurnal FISIP Universitas Riau, Pekanbaru

Mutiadi, Ahmad Dedi dan Didin Syamsudin. 2014. *Analisis Konjungsi Koordinatif dan Konjungsi Subordinatif pada Novel Gurita David Karya Willy W*. Jurnal Fon. Volume 4. No.1

S. Redford, Emmette, 1975., *Ideal and Practice in Public Administration*, The University of Alabama Press, USA

#### Sumber Lain

Sinaga, 2013, *Perkembangan UKM di Hambat Birokrasi Perizinan*, di unduh dari dari <http://economy.okezone.com> tanggal 15 Januari 2019

Definisi Konseptual, Operasional, Dimensi dan Indikator Efektivitas Kerja Pegawai Kecamatan <https://tesisdisertasi.blogspot.com/2011/03/definisi-konseptual-operasional-dimensi.html>